

# PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DALAM MEMBUKA LAPANGAN KERJA, (Studi Kasus di Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu)

Burhan Sesa

Universitas Andi Djemma

[burhansesa@gmail.com](mailto:burhansesa@gmail.com).

Kodrat R

STISIP Veteran Palopo

[kodrat.r1962@gmail.com](mailto:kodrat.r1962@gmail.com)

## Abstrak

Salah satu strategi percepatan dan pemerataan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Nawacita ketiga, ditekankan membangun Indonesia yang dimulai dari Pingggiran Desa untuk memperkuat daerah 3 T (Terluar, Tertinggal dan Terdepan) dalam memperkuat bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan infrastruktur desa merupakan aktivitas kegiatan pembangunan yang dilaksanakan ditingkat desa, yang meliputi beberapa aspek yang menunjang percepatan proses kehidupan masyarakat harmonis yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Pembiayaan Alokasi Dana Desa, melalui pendekatan kearifan local, dalam mendukung percepatan seperti pembangunan jalan tani, embung desa, irigasi desa, sanitasi, jalan desa dll. Ketersediaan dan akses pemanfaatan terhadap sarana prasarana Infrastruktur perdesaan yang masih sangat terbatas dan ditambah masih rendahnya kualitas tingkat pelayanan yang dapat dinikmati seperti jalan, irigasi, listrik, air minum, telematika, fasilitas pendidikan, kesehatan, Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Infrastuktur khususnya jalan, jembatan, merupakan wadah transformasi layanan public untuk mengakselerasi dan memudahkan kelancaran arus barang dan jasa, membuka lapangan usaha dan lapangan kerja seta membuka kesempatan /peluang masyarakat yang berdomisili dilembah pegunungan nan jauh dari akses jalan .untuk mengangkut dan memasarkan hasil produksi pertanian, perkebunan, hanya menggunakan transportasi seadanya, seperti sepeda, dan motor (ojek) untuk angkutan pedesaan berupa pete pete /roda empat belum seluruhnya tersedia/ terjangkau, sarana jalan dapat dilalui karena kondisi berlubang dan berlumpur.

Pembangunan Infrastruktur merupakan katalisator dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan dasar manusia baik itu kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

**Kata Kunci** : Percepatan Pembangunan Infrastruktur pedesaan, dan peluang lapangan kerja

## LATAR BELAKANG

Percepatan pembangunan perdesaan, yang telah dan akan terus dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan sebagai upaya kongkrit dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kebijakan Pemerintah Kabinet Kerja terutama dalam meretas kemiskinan dan pengangguran yang semakin menggurita Berbagai upaya terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, melalui pendekatan kearifan local Yang dapat berfungsi untuk menjaga kelestarian dan ketersediaan asset akan potensi sumber daya baik sumber daya alam (SDA) yang dikelola melalui Sumber daya manusia (SDM) yang memiliki ketrampilan yang tersedia disekitar lingkungannya. Kearifan local dapat dijadikan sebagai pedoman acuan bagi warga masyarakat pedesaan dalam berekspresi, berkreaitif dan berinnovasi dalam menapak kehidupannya melalui penguatan dan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa, peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan masyarakat, pemberdayaan adat dan penguatan lembaga sosial budaya masyarakat, peningkatan usaha ekonomi masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya alam yang ditunjang teknologi tepat guna. Pembangunan infrastruktur merupakan konsep yang sangat multidimensional, yang mengacu kepada serangkaian karakteristik dan segenap aspek kehidupan, masyarakat pedesaan, baik aspek politik, ekonomi maupun sosial.(pendidikan dan kesehatan)

Upaya percepatan yang dapat dilakukan berupa peningkatan usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal dengan meningkatkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Menurut Fred W.Riggs, 1994, perlunya pendekatan sistim pembangunan lembaga, sebagai organisasi yang membentuk, menunjang dan melindungi hubungan normative dan pola pola kegiatan tertentu dan sekaligus membentuk fungsi-fungsi dan jasa yang dihargai didalam suatu lingkungan. Pembangunan infrastruktur desa yang dibiayai dari berbagai sumber, terutama Pembiayaan Alokasi Dana Desa, Dana DAU maupun Dana DAK yang dilaksanakan selama ini dimaksudkan untuk mndukung percepatan pembangunan infrastruktur dan usaha kegiatan skala kecil yang tidak dibiayai oleh APBD melalui instansi terkait namun sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa. Ketersediaan dan akses pemanfaatan terhadap sarana prasarana Infrastruktur perdesaan yang masih sangat terbatas dan ditambah masih rendahnya kualitas tingkat pelayanan yang dapat dinikmati seperti jalan, irigasi, listrik, air minum, telematika, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta pasar merupakan kendala bagi percepatan pembangunan Infrastruktur perdesaan terutama untuk pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan, pengembangan sarana prasarana produksi hasil-hasil perdesaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia perdesaan Kendatipun demikian, menurut Wikyantiyoso,et al, 2021, menyebutkan perlunya pembangunan partisipatif dapat berguna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menata dan membangun desa berkelanjutan. Dengan mengikutsertakan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam program-program pembangunan yang lebih kreatif dan inovatif. Pembangunan infrastruktur Perdesaan sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan masih belum menjangkau seluruh wilayah perdesaan yang ada. terutama pada daerah yang tergolong kategori 3 T (terluar, terpencil, terdepan) pada umumnya tingkat pembangunan sangat minim baik dari kuantitas maupun kualitas, seperti jalan penghubung antar desa masih tergolong jalan tanah, sebagian dikerikil, demikian sarana jembatan yang terbuat dari pohon kelapa kelapa, pohon kayu yang dibentang diatas sungai yang dalam dan deras, yang kadang sudah lapuk yang sewaktu

waktu membahayakan warga yang melintas dengan melibatkan masyarakat untuk pemeliharaan secara mandiri.

. Berbagai kendala yang menghadang pertumbuhan ekonomi lokal, yang umumnya terkait dengan pelayanan,, mekanisme dan kebijakan dalam mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat, seperti birokrasi dalam perizinan. Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi rendahnya SDM dan daya saing produk ekonomi lokal serta belum optimalnya program-program yang mendukung investasi potensi local. Salah satu penyebab minimnya sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan. Untuk memacu peningkatan pendapatan masyarakat perdesaan/petani di bidang produksi pertanian,/perkebunan yang dirasakan masih rendah maka kebijakan pembangunan infrastruktur untuk membuka akses jaringan layanan seperti pembangunan Infrastruktur jalan, jembatan, irigasi desa, transportasi yang masih dirasakan belum berpihak kepada kepentingan warga desa, disana sini mengalami kerusakan yang mengakibatkan tingginya biaya (cost) untuk mengangkut dan memasarkan hasil hasil pertanian/perkebunan mereka, dalam artian masyarakat petani yang berdomisili dilembah pegunungan nan jauh dari akses jalan yang memadai .untuk mengangkut dan memasarkan hasil produksi pertanian/ perkebunannya, hanya dapat menggunakan transportasi seadanya, seperti sepeda, dan motor (untuk angkutan pete pete (roda empat) belum seluruhnya terjangkau, hl ini terjadi karena sarana jalan tidak dapat dilalui karena kondisi berlubang dan berlumpur serta jembatan penyeberangan masih darurat, dan kadang langsung melintasi arus sungai yang deras, dan dalam.

Pemamfaatan Potensi sumber daya alam seyogianya dilaksanakan berdasarkan konsep pembangunan berbasis masyarakat, Oleh Aprilla Theresia, dkk,2015, dimaksudkan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, kelembagaan, nilai-nilai, sosial budaya, dll. yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat setempat. yang melimpah ruah dikampung /desa, dan untuk memacu semangat kerja dan inisiatif masyarakat untuk membangun desanya serta meningkatkan produktivitas hasil pertanian/ perkebunannya maka seyogianya program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan mendapat prioritas perhatian penanganan, Sebagaimana pernyataan Presiden Jokowi, (2019), jika saya bangun desa berarti saya bangun RI, hal ini menggambarkan bahwa komitmen pemerintah /kabinet kerja. dalam membangun desa sangat besar hal ini dibuktikan dengan hadirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang ditindaklanjuti dengan transfer dana desa setiap tahunnya melalui APBN yang mekanisme pencairan, penggunaan langsung ke Kas Desa lewat APBD.

Percepatan pembangunan yang dimulai dari pinggiran pedesaan merupakan wadah transformasi untuk menunjang pembangunan nasional. Terutama aspek keadilan dan pemerataan pembangunan. Salah satu kebijakan pembiayaan dalam pembangunan desa tersebut yakni alokasi dana desa (ADD). Dana ini diartikan (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa) sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa. Ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan kota, yang diperuntukkan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri DEsa.Daerah TERtinggal dan TRansmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

disebutkan bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengalokasian Dana desa tidak hanya untuk mengentaskan desa dari keterisolasian dan kemiskinan, namun yang sangat penting menyiapkan lapangan usaha dan lapangan kerja secara berkelanjutan. Hal ini merupakan langkah kebijakan pemerintah untuk menarik minat anak muda pedesaan untuk tidak melakukan urbanisasi mencari pekerjaan keluar daerahnya. Transfer Dana desa juga diprioritaskan pada kegiatan yang mampu menciptakan kegiatan usaha ekonomi kreatif dan produktif, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi warga desa. Dana desa bisa menciptakan peluang kerja bagi anak muda, akan bermanfaat dan memiliki peran yang positif sebagai perekat dan dinamika roda ekonomi pembangunan desa, hal ini dapat terwujud apabila penggunaan/pengelolaannya dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, transparan, optimal melalui swakelola, dan dapat dipertanggungjawabkan ( akuntabilitas) dengan pelibatan/partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemamfaatan yang sesuai dengan ketentuan.

Akselerasi dan percepatan dalam pemamfaatan dana Desa, diperlukan sebuah pendekatan kearifan local. merupakan sebuah Langkah positif dalam memacu peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya dipedesaan, dengan tetap memperhatikan kearifan local masyarakat setempat. Menurut Aprilla Theresia, dalam Oding, 2015, menyebutkan bahwa untuk keberhasilan pembangunan sumber daya masyarakat dan sumber daya alam, diperlukan semangat kemandirian dan keswadayaan, memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan serta mendorong teknologi tepat guna yang efektif dari segi biaya dan memberikan kesempatan untuk memahami, membantu memfasilitasi rancangan program. Pemamfaatan Dana Desa yang dikururkan pemerintah secara langsung ketingkat Desa, merupakan terobosan dalam memangkas birokrasi dalam percepatan berbagai kegiatan pembangunan dengan asumsi bahwa kucuran dana DEsa yang digelontarkan langsung ketingkat DEsa dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan Infrastuktur pedesaan dalam membuka lapangan usaha, lapangan kerja serta meretas tingkat pengangguran. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana dampak positif pemamfaatan Dana Desa dalam pembangunan Infrastruktural

## KAJIAN TEORITIS

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang disampaikan oleh Presiden Jokowi,(2019), bahwa infrastruktur yang dibangun harus menjadi konektivitas yang dapat menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, kawasan wisata, serta dapat mendongkrak, membuka lapangan kerja baru. Dalam memacu pergerakan Pembangunan masyarakat desa yang semakin membutuhkan perhatian,, maka pengembangan sector produksi unggulan desa menjadi motor penggerak dinamika ekonomi warga seperti produk Unggulan Desa sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil produksi Coklat, Kopi, Pisang, Kelapa, yang dibalut dengan sentuhan teknologi tepat guna (TTG) menjadi pendorong kegiatan pembangunan yang dinantikan untuk dilaksanakan ditingkat desa, yang meliputi beberapa aspek yang menunjang proses kehidupan masyarakat yang harmonis dengan memperhatikan kondisi kearifan local yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Geliat membangun Desa, yang ditunjang semangat kebersamaan dan gotong royong yang miris punah, maka melalui gagasan, musyawarah dengan

mengedepabkan nilai -nilai, luhur yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat secara turun-temurun yang berfungsi sebagai perekat dinamika pembangunan.

Pembangunan infrastuktur sebagai equalibrum pembangunan pedesaan menjadi konektivitas untuk memperkuat tatanan dan kondisi kehidupan social masyarakat khususnya dalam meretas dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, dalam artian bahwa dengan tersedianya akses sarana dan prasarana infrastruktur yang baik, memungkinkan terjadinya akselerasi dan kemudahan layanan arus barang dan jasa yang keluar masuk kedesa tersebut untuk mengangkut –menjual barang-barang hasil produksi sehingga nilai /harga barang hasil pertanian/ perkebunan masyarakat, memiliki nilai jual, nilai tambah yang mereka terima, dimana selama ini lebih dominan ,lebih dinikmati oleh pedagang, pengusaha/tengkulak.

Untuk menguatkan potensi yang dimiliki diperlukan tenaga pendampingan, dalam melakukan transfer knowledged yang memiliki pengetahuan, ketrampilan mengajarkan bagaimana cara proses produksi mulai dari kegiatan penanaman, pemanenan, proses fermentasi, pengeringan, proses pncepakan/pembukusan, sehingga semua proses kegiatan yang diperoleh memiliki nilai tambah (value added) ditransformasikan ke warga masyarakat dapat diwujudkan/ dikerjakan dengan baik, sehingga dalam mengelolah potensi SDA yang ada mempunyai nilai tambah dan nilai jual tinggi, dalam artian suatu saat dengan kemandirian serta kemampuan yang diperoleh dari Pembina/pembimbing kegiatan ( tenaga ahli dibidangnya) dapat menjadi peluang usaha dsan lapangan kerja dan meningkatkan produksi, serta pmeningkatan pendapatan yang tentunya bermuara pada peningkatan kesejahteraan social pada umumnya.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan memuka akses jaringan produksi dan distribusi hasil hasil produksi pertanian masyarakat, maka prioritas pembangunan pedesaan yang mendapat dukungan pendanaan anggaran dana desa untuk pembangunan infrastuktur dan akses Transportasi jalan desa, jembatan desa yang selama ini menjadi keluhan dan kebutuhan pokok warga, sehingga dapat diprediksi bahwa dengan terciptanya percepatan pembangunan infrastuktur akses transportasi yang memadai ditingkat pedesaan, memungkinkan adanya pilihan bagi pemuda desa untuk tinggal memperbaiki desanya untuk melakukan usaha kegiatan kreatif dan produktif dibanding bila mereka mengikuti program TKI/TKW yang belum tentu memberikan solusi yang diinginkan. Dan dengan pembangunan infrastruktur pedesaan yang baik tersebut, memungkinkan pihak investor melirik potensi keunggulan sumber daya alam yang selama ini belum dieksplotasi, memudahkan bagi pihak pedagang untuk memasarkan kebutuhan kebutuhan warga yang dibutuhkan, atau paling tidak dengan peningkatan dan pengembangan akses transportasi yang layak, memungkinkan tejadinya arus transformasi informasi dan inovasi yang bernilai positif buat peningkatan wawasan dan pengetahuan masyarakat. Terjadinya perubahan social begitu cepat hadir ditengah masyarakat, seperti pemasangan jaringan PLN, Jaringan Telkom, karena dukungan sarana dan prasarana, yang diperoleh dari media social (TV) memungkinkan warga masyarakat local memiliki kesempatan, peluang untuk mengelola, mengeksploitasi potensi sumber daya alam yang dimiliki.

Pengembangan pembangunan irigasi desa, Pada umumnya dibeberapa wilayah pedesaan terdapat arus sungai yang belum termamfaatkan secara optimal, Dengan melalui pengembangan dan pembangunan infrastuktur irigasi desa melalui pemamfaatan air sungai sebagai pembangkit listrik pedesaan, obyek wisata bahari, pembangkit air irigasi desa untuk mengairi persawahan yang selama ini hanya menggantungkan air tadah hujan dalam bercocok tanam/ mengolah sawah. Dalam artian dengan dukungan penggunaan

tehnologi tepat guna, maka air sungai yang selama ini tidak termamfaatkan secara maksimal, dengan dukungan alokasi dana desa dapat dibangun sistim embung,/waduk /irigasi desa, sehingga lahan produktif yang hanya diolah/ ditanami sekali dalam musim tanam tentunya tingkat produktivitas pertanian masyarakat akan rendah, diabndingkan dengan menggunakan sistim irigasi primer/bendungan irigasi yang tingkat debit airnya lebih besar dan lebih stabil setiap musim tanam. Diharapkan dengan pembangunan sector irigasi dapat memberikan kesempatan kerja bagi petani untuk mengolah tanah persawahannya dua, tiga kali dalam setahun. Dapat membudidayakan ikan (lele, karper, nila,dll) dalam keramba Dalam artian petani memiliki kesempatan lapangan kerja dan mendapatkan pendapatan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, seperti perbaikan rumah, pendidikan anak anak, kesehatan, dan kebutuhan social lainnya. Selain itu pembangunan saluran irigasi yang digagas, diprogramkan oleh pemerintah yang dianggarkan melalui Alokasi Dana Desa setiap tahunnya, paling tidak warga masyarakat desa berpeluang mendapatkan lapangan usaha, lapangan kerja yang layak.

Prioritas pembangunan infrastuktur pembangunan bidang olahraga, dengan prinsip mengolaragakan masyarakat, dan memasyarakatkan olaraga dilakukan pemerintah dalam rangka megangkat harkat dan martabat masyarakat pedesaan, mempersiapkan generasi yang tangguh dan sehat dalam menjaga, melanjutkan pembangunan. Dengan pembinaan olahraga tradisional yang ada didaerah menjadi ciri khas, perekat dan pemersatu sekaligus menjadi sarana menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Bahwa pembangunan olahraga mempunyai misi yang lebih luas dan dalam, untuk membina membangun kesehatan jasmani dan rohani setiap anggota masyarakat. Karena itu pula sangat jelas, bahwa disamping merupakan bagian dari keseluruhan pembangunan bangsa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Adapun **Prioritas** dari kegiatan **pembangunan desa, antara lain ;** ⊕a). Melanjutkan pembangunan di semua bidang (b). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah desa, kelembagaan desa dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pembangunan;(c) mengembangkan akses pasar dengan mengutamakan potensi ekonomi desa setempat (d). Menata sarana dan prasarana keolaragaan dan lingkungan

### **Pengertian Desa**

Berdasarkan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah (PP. 72 Tahun 2005,) Tentang Desa, Desa atau yang sering disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam negara kesatuan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai ujung tombak pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Desa adalah **kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. Oleh Widjaja,** bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang susunan aslinya berdasarkan hak-hak awal yang istimewa. Gagasan dasar pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.Dimana setiap tahunnya Pemerintah Pusat telah menyalurkan Dana Desa yang cukup besar untuk digunakan meningkatkan pembangunan dan kebutuhan

masyarakat Desa. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Berdasarkan PP 43 Tahun 2014 Pasal 1 angka (8), menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Menurut Lili,2018, dana desa adalah kucuran dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari pajak dan APBN /APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses kegiatan sekaligus pembangunan pedesaan bagi pemerintahan desa. Dana Desa adalah **sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah**, dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10%.

### **Pengertian Pembangunan**

Pada dasarnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju kekeadaan yang lebih baik (SP, Siagian, 2000), yang berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan adalah seperangkat usaha yang terencana dan terarah dalam menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia (Bintoro Tjokroaminoto,1998).. Mamfaat menunjukkan suatu kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian pada hal-hal yang berguna baik di pergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna. Menurut Todaro, 1989, bahwa pembangunan merupakan sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 ditetapkan arah kebijakan pembangunan perdesaan adalah sebagai berikut: (1). Memperkuat kemandirian desa dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, (2). Meningkatkan ketahanan desa, serta (3). Meningkatkan daya tarik perdesaan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan pendapatan seiring dengan upaya peningkatan kualitas SDM dan lingkungan.

Sasaran pembangunan perdesaan dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan peran pemerintah desa serta kelembagaan masyarakat,
2. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dan perlindungan masyarakat adat,
3. Pengembangan ekonomi perdesaan,
4. Peningkatan sarana dan prasarana perdesaan, serta
5. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Dengan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan tersinkronisasi dengan pembangunan perdesaan, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menopang kegiatan yang diinginkan. Termasuk diantaranya adalah sektor-sektor ekonomi yang akan dikembangkan dalam suatu kawasan. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

(PPIP) merupakan salah satu program pembangunan infrastruktur untuk kawasan desa dalam kategori berkembang yang berbasis pada partisipasi masyarakat. PPIP berada di bawah payung kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan komponen kegiatannya meliputi kegiatan fasilitasi dan mobilisasi masyarakat. Adapun maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah dalam rangka mengurangi kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat pemerintah daerah. PPIP yang dilatarbelakangi semangat untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan ini merupakan program lanjutan dari program pembangunan infrastruktur perdesaan sebelumnya.

### **Pengertian Infrastruktur**

Menurut Bintarto, R, desa merupakan hasil ekspresi geografis, sosial, politik, dan budaya yang ada di suatu wilayah dan saling terkait dengan wilayah lain. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dilaksanakan untuk mewujudkan dan peningkatan konektivitas dan akses masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan, termasuk minoritas terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Neil S. Grigg “1998” ialah sistem fisik yang menyediakan sarana drainase, pengairan, transportasi, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan dasar manusia baik itu kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. membangun infrastruktur berarti mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketersediaan infrastruktur dimaksudkan untuk memudahkan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Menurut Grigg, 1988, Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat.

Menurut N. Gregory Mankiw (2003), infrastruktur adalah wujud modal publik (*public*

### **Pentingnya Pembangunan Infrastruktur**

Oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan 2020,) menyebutkan pentingnya infrastruktur 1). sebagai salah satu pendukung berkembangnya industri kreatif di Indonesia. 2). membangun sumber daya manusia yang mumpuni. Selain itu untuk :

- a). Pemerataan pembangunan , infrastruktur yang baik, maka semua akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses ekonomi di dalamnya
- b). membuka lapangan pekerjaan baru untuk dan bagi penduduk daerah
- c). Banyak investor yang ikut serta memajukan daerah .

Selain itu Pembangunan Infrastruktur berfungsi :

(1). . Memberikan multiplier effect, Dengan adanya pembangunan infrastruktur berupa jalan raya, pelabuhan, bandara, jalan tol, drainase, irigasi, pembangkit listrik dan segala macamnya, keadaan ekonomi Indonesia perlahan akan meningkat seperti efek domino yang bercabang. efek multiplier yang di dambakan itu akan muncul, Multiplier effect

selain muncul dari saat proses pembangunan, juga akan berdampak ketika semua proyek infrastruktur sudah rampung sepenuhnya

(2). Meningkatkan pemerataan dan pendapatan, Dengan adanya infrastruktur yang memadai, ketimpangan-ketimpangan di Indonesia perlahan-lahan akan mulai sirna. Pembangunan pelabuhan dan rencana tol laut juga turut meningkatkan daya saing di tiap daerah. Harga-harga barang pokok di tiap-tiap daerah mulai menurun dan bisa diakses dengan mudah. Meningkatkan produksinya untuk dipasarkan di daerah lain yang dimana meningkatkan sektor ekonomi di daerah tersebut.

(3). Meningkatkan daya saing Indonesia di bidang bisnis, Dengan infrastruktur yang memadai, Indonesia bisa dengan bangga untuk mempromosikan dirinya ke investor-investor asing.

(4). Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan sarana pendidikan, secara langsung juga SDM Indonesia juga akan meningkat dengan pendidikan yang makin merata di seluruh Indonesia. teknologi canggih, diharapkan bisa membawa transfer skill dan teknologi kepada para pekerja Indonesia. Dampak pembangunan Infrastruktur menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur.lain, Contoh; pembangunan jalan akan memudahkan akses masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, dan mempermudah distribusi, mobilisasi barang dan jasa bagi masyarakat dalam beraktivitas.

Pada prinsipnya pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi. Pembangunan Infrastruktur sebagai motor penggerak di sektor perekonomian dan sekaligus menjadi katalisator dan pendorong berkembangnya sektor-sektor ril terkait. Sebagai sumbu dan roda pembangunan *multiplier* effect, pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru, lapangan kerja, dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi. Pembangunan Infrastruktur jalan sangat penting dan diperlukan sebagai alat penghubung kesuatu tempat dengan tempat yang lain. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi pertanian, perkebunan masyarakat dengan kawasan distribusi, serta mempermudah akses ke kawasan wisata, yang bermuara pada penciptaan lapangan kerja baru, serta memungkinkan akselerasi nilai tambah perekonomian, atas bertumbuhnya kegiatan ekonomi kreatif dan kegiatan produktif masyarakat pedesaan.melalui pemamfaatan potensi sumber daya alam (SDA). Dengan adanya akses jalan yang mudah dijangkau akan mempengaruhi unsur strategis suatu tempat dan dengan mudahnya akses akan mempengaruhi banyaknya pihak swasta yang mau berinvestasi. Dengan banyaknya pihak swasta yang mau berinvestasi tersebut akan mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Sedangkan peningkatan kualitas hidup akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dengan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan dan jumlah pengangguran suatu daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, untuk pertimbangan efisiensi dan keterbatasan dana, tenaga, waktu dan kemampuan maka menurut Sugiyono,2012,pendekatan penelitian yang baik adalah yang efisien, valid dan reliable sehingga data yang langsung diperoleh dari sumber data dengan tujuan untuk memecahkan masalah . membuat gambaran secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta maupun kondisi kearifan local – Studi ini dilakukan di

Kantor Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu. Dalam kegiatan penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan personal dengan orang-orang yang akan terlibat secara langsung maupun tidak terlibat secara langsung dalam proses penelitian guna memperoleh pemahaman dan gambaran yang mendalam perihal masalah pembangunan infrastruktur.

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian deskriptif,

- a. Action Reseach, menurut Sugiyono,2012, adalah suatu proses yang menghendaki terjadinya suatu perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat dalam memperbaiki tingkat kesadarannya untuk turut aktif berpartisipasi, dalam pembangunan infrastruktur atas segala kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atas penggunaan sumber daya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, dengan jalan mengubah mendseat, pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat, serta pengambil kebijakan, pengelola pembangunan, khususnya pemerintah tingkat bawah, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Untuk maksud tersebut perlu diberikan motivasi, untuk lebih proaktif dalam setiap program pembangunan
- b. Policy approach, Dengan melalui metode penelitian deskriptif merupakan metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat, mulai dari proses perumusan kebijakannya, perencanaan, pelaksanaannya sampai tahap evaluasi kinerja. Metode adalah suatu cara atau prosedur untuk mengetahui apakah kebijakan, sudah sejalan dengan apa yang diharapkan, serta berupaya mengambil langkah- kebijakan sistematis untuk perbaikannya. Metodologi penelitian ini adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan- peraturan yang terdapat dalam penelitian ini yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa, dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan kualitatif yang merupakan suatu proses pemahaman analitis berdasarkan metodologi yang digunakan untuk menyelidiki suatu situasi tentang kondisi mengenai kinerja yang akan dicapai dalam penyusunan dan penetapan beberapa program kerja yang akan dikerjakan, Peneliti membuat suatu gambaran yang kompleks, motivasi, kualitas / capaian kinerja, laporan terinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi sosial yang dialami (Bungin, 2007).

Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan tehnik analisa kualitatif, dengan metode pendekatan penelitian deskriptif. Untuk efektifnya penelitian ini dilakukan melalui Penelitian Ex Post Facta, adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti suatu peristiwa yang telah terjadi dan selanjutnya memperhatikan hasil hasil yang dicapai sebelumnya hal ini dilakukan untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan timbulnya hambatan dalam meningkatkan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program. Menurut Sugiyono, (2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang dianggap memenuhi syarat, dengan menggunakan logika dasar yang sama dengan penelitian

### **Sumber data**

Data ini dikumpulkan guna memenuhi penelitian dan perampungan, penyelesaian serta meminimalisir permasalahan utamanya dalam pelaksanaan pembangunan Infrastruktur pedesaan pada wilayah Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu . Sumber data yang diperlukan dalam penelitian tentang pemanfaatan dana desa dalam mendukung pembangunan infrastruktur sebagai bentuk keberpihakan pemerintah, diklasifikasikan kedalam dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder Berdasarkan jenis data diatas maka data – data tersebut diolah, untuk mendukung proses pembahasan perencanaan partisipatif dengan sistim pemberdayaan yang selanjutnya, diperlukan data penunjang lainnya meliputi :

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian atau survey langsung di lapangan sesuai dengan kondisi yang riil. Seperti,

- a). Kondisi lapangan (Eksisting) pada wilayah Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu,
- b). Waktu pelaksanaan kegiatan dilokasi, dan pelibatan partisipasi masyarakat setempat guna mengawal program pembangunan yang sedang dan akan dikerjakan, dilakukan mulai saat ini, sampai pasca akhir kegiatan dan akan dilakukan evaluasi /perbaikan sistim proses perencanaan, pelaksanaan untuk kebijakan penyusunan pembangunan tahun yang akan datang.

2. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari berbagai dokumentasi resmi ataupun tidak resmi yang dalam penelitian ini banyak bersumber dari peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri desa, dan diambil juga dari literatur-literatur yang berhubungan dengan materi penelitian untuk mendukung data primer .Pross kegiatan dengan melakukan telaah terhadap data data yang diperoleh dari berbagai stakeholders baik yang dilakukan dengan wawancara, maupun observasi lapangan, yang selanjutnya dikaji, diamati dan dipadukan dengan inpormasi yang diperoleh sebelumnya.

Mengacu pada pendapat Bogdan dan Taylor (Moleong,2000) bahwa metodologi kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa narasi, untaian kalimat tertulis maupun lisan dari orang- orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Pada penelitian kualitatif, peneliti sekaligus sebagai instrumen kunci. berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. (Nazir, 1999), atau berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan yang berbasis pemberdayaan, dalam mengelola dan melaksanakan pembangunan yang Pro rakyat, sehingga berdaya guna dan berhasil guna terhadap pertumbuhan dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan. Menurut Moleong, 2000, dan sesuai dengan pandangan Nawawi (1989) bahwa penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan ini ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena sosial maupun fenomena kemasyarakatan yang berhubungan dengan rencana kegiatan fisik Pembangunan infarastruktur pedesaan pada desa-desa atau wilayah pinggiran yang belum tersentuh hasil pembangunan. dalam bentuk, aktivitas, karakteristik, koordinasi Pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan apakah sudah seirama kebutuhan masyarakat, dengan fungsi layanan yang transparan dan akuntabel yang diharapkan oleh stakeholders.

### Tehnik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan :

- a. Observasi, / penelitian lapangan : peneliti melakukan study lapangan yaitu kunjungan langsung terhadap proses kegiatan, maupun capaian /tingkat kemajuan dan prosentase fisik dimana dalam proses pelaksanaan pekerjaan diamati sedemikian rupa untuk mengetahui apakah proses kegiatan pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan Infrastruktur oleh masing masing Desa dalam wilayah Kecamatan Bajo Barat, sudah menjalankan kebijakan sesuai dengan ketentuan
- b. Kusioner, tehnik pengumpulan data dengan menggunakan bahan / format isian berupa pertanyaan, pernyataan atau isian yang diberikan kepada pihak responden/ populasi /masyarakat secara acak yang diharapkan akan melengkapi hasil penelitian peneliti baik yang dilaksanakan secara langsung memberikan informasi seputar kegiatan pelaksanaan/ pembangunan percepatan pembangunan Infrastruktur pedesaan di Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu.
- c. Wawancara, tehnik pengumpulan data yang dilakukan peneliti, yakni dengan melakukan kunjungan ke kantor/ instansi,/SKPD/OPD/ tokoh masyarakat, tokoh adat, yang dimaksudkan untuk menjaring informasi secara mendalam mengenai hasil kegiatan pembangunan yang diagendakan maupun layanan yang diterima/ diberikan oleh aparat /petugas Kecamatan atau Instansi terkait dalam wilayah Kecamatan.Bajo Barat Kabupaten Luwu.

### Tehnik Analisa Data

Hasil penelitian yang diperoleh dan akan dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif dengan tehnik kualitatif. yang didukung oleh dua data kuantitatif secara prosentase dengan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

P= Prosentase

F= Frekuensi

N= Jumlah Responden

Dengan catatan : 86 -100 = Sangat Baik

71 - 85 = Baik

56 - 70 = Cukup

41--55 = Kurang

-- 40 = Tidak Baik/ Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran umum dan keadaan geografis

Kecamatan Bajo Barat merupakan hasil pemekaran tahun 2001, dari Kecamatan Bajo (sebagai Kecamatan Induk) persisnya berada pada ketinggian 2100 dari permukaan laut, yang berada dibawah kaki gunung Latimojong. Untuk menuju dari dan ke Kecamatan Bajo Barat dapat menggunakan akses jalur jalan Selatan (lewat jalur Desa Sampeang) melewati Jembatan Sampeang, yang sering hanyut diterjang banjir, sedang jembatan Lekopini hampir jatuh / rusak dimakan usia (bangunan Belanda), Secara geografis jematan Lekopini, merupakan akses satu satunya yang dapat diakses/menghubungkan menuju Ibukota Kecamatan Bajo Barat (Bonelemo) sarana jalan sebagian sudah diaspal dan sebagian rusak, yang merupakan jalur penghubung ke beberapa kecamatan seperti Kec.Latimojong, dan Kec, Bastem. Kec, Bastem Utara Kondisi jembatan ini sangat rusak dan membahayakan pihak / kendaraan yang melintas diatasnya. Selain itu dan dapat pula menggunakan akses lingkara Utara, melewati desa Marinding, Tettekang, Desa Soronda, dimana akses jalan Sebagian rusak utamanya pada tebing gunung yang dilalui, yang dapat menimbulkan kecelakaan dan korban jiwa, apabila pembangunan infrastruktur jalan tersebut tidak ditangani segera.

a. Batas wilayah administratif

- Sebelah Utara : Kec. Bupon
- Sebelah Timur : Kec. Bajo
- Sebelah Selatan : Kec. Suli Barat
- Sebelah Barat : Kec. Latimojong

b. Luas Wilayah Administratif Luas Wilayah : 66,3 km<sup>2</sup>

c. Jumlah Desa dan Kelurahan Desa : 9 buah

### 1. Kondisi Pendidikan

Tabel : 4, Jumlah sekolah Dasar (SD), SMP, SMA, dalam wilayah Kecamatan Bajo Barat, 2020

Desa/Kel.	SD.Neg.	SMP.Neg /	SMA.Neg/	SD.Swast a	SMP Swasta	SMA Swasta
Saronda	2	-	-			
Tumbubara	-	-	-			
Sampeang	1	1	-			
Kadong2	1	1	-			
Marinding	1	-	-			
Tetekang	1	1	-			
Bonelemo	1	-	-			
Bonelemo Utara	1	-	-			
Bonelemo Barat	1	-	-			
Jumlah	9	3	-			

Sumber : Data setelah diolah peneliti,

Gambaran dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa untuk melanjutkan estapet kepemimpinan dimasa yang akan datang tentunya diperlukan

sumber daya manusia (SDM) yang secara diri perlu dipersiapkan Memiriskan, dari Fasilitas sarana prsarana berupa gedung (pisik), pada dasarnya belum cukup untuk menampung anak didik yang jumlahnya cukup signifikan, Dari 9 Desa yang ada diwilayah Kecamatan Bajo Barat menunjukkan bahwa tiap desa hanya memiliki 1 buah gedung SD (9 buah SD), sedang untuk sekolah lanjutan SMP, sangat minim (baru 3 Unit), yang ratio jumlah tammatan SD dengan ketersediaan SMP yang siap menampung anak didik tidak seimbang, itupun lokasinya antara satu SMP sangat berjauhan jarak tempuh, dan memerlukan beberapa jam menuju ke SMP yang dituju. Demikian pula untuk jenjang ketingkat SMA sama sekali belum ada, dalam artian tidak ada pilihan lain bagi keluarga, dan anak didik yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan ke SMA harus mempersiapkan diri,mental dll, karena fasilitas SMA hanya tersedia di Kecamatan Bajo dan Kecamatan Belopa. Yang jarak tempuhnya cukup jauh.(Ibukota Kabupaten Luwu)

### 3. KOndisi Kesehatan

Tabel : 5, Jumlah sarana Kesehatan dalam wilayah Kec. Bajo Barat, 2020

Desa/Kelurahan	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	BKIA	Polindes	Posyandu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Saronda	-	-	-	-	1	4
Tumbu Bara	-	-	-	-	1	2
Sampeang	-	-	1	-	-	2
Kadong-Kadong	-	-	1	-	-	2
Marinding	-	-	-	-	1	1
Tetekang	-	-	-	-	-	1
Bonelemo	-	1	1	-	-	2
Bonelemo Barat	-	-	1	-	-	1
Bonelemo Utara	-	-	-	-	-	2
<b>Jumlah</b>	-	<b>1</b>	<b>4</b>	-	<b>3</b>	<b>17</b>

Sumber: Puskesmas Kecamatan Bajo Barat

Dari gambaran table tersebut diatas (table,1), menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Bajo Barat sebanyak 10.804 jiwa (laki2, 5.362 jiwa, dan 5.442 perempuan).dengan pokok mata pencaharian terkonsentrasi pada pola pertanian dan perkebunan. Dan untuk bidang pendidikan dasar (SD) merata pada setiap Desa (kecualai Desa Tumbubara) (table 2), untuk jenjang SMP terdapat 3 SMP negeri yaitu SMP Sampeang, SMP Kadong Kadong,dan SMP Tetekang.Dalam artian anak anak yang ingin melanjutkan pendidikan ketingkat pendidikan SMP pada umum mendaftarkan diri pada SMP terdekat yang lokasinya sangat berjauhan, sedang untuk jenjang pendidikan SMA, siswa didik melanjutkan pendidikannya di Kecamatan Bajo (induk) yang jarak tempuh dilakukan beberapa jam atau dapat menumpang melalui kendaraan teman,tetangga atau menggunakan motor, dan ojek, sedang mobil umum (pete pete) tidak tersedia,maka

selebihnya untuk siswa yang tidak memiliki kendaraan dapat menumpang pada rekan /keluarga, atau dengan jalan kaki menempuh beberapa kilometer.

Sedang untuk fasilitas infrastruktur kesehatan, (table 5) Puskesmas satu satunya terdapat di Ibukota Kecamatan (Bonelemo), yang diisi 2 dokter (umum dan Gigi) dan Pustu terbagi di 4 Desa (Pustu Kadong2, Pustu Sampeang, Pustu Bonelemo, dan Pustu Bonelemo Barat) Secara umum kondisi ,fasilitas infrastuktur bidang kesehatan dapat disebutkan belum memadai, sehingga bila ada warga masyarakat yang membutuhkan pertolongan melahirkan selain dirujuk di RSUD Belopa selebihnya ditangani bidan bahkan dukun kampung.

### **Dukungan fasilitas Infrastruktur, konektivitas pembangunan dan lapangan kerja.**

**Pembangunan infrastruktur** pedesaan yang menghubungkan wilayah produksi dengan daerah distribusi, termasuk mempermudah akses menuju ke kawasan wisata, serta diharapkan membuka peluang lapangan kerja, dan mengakselerasi perekonomian rakyat. konektivitas diwujudkan dalam ketersediaan infrastruktur yang memadai guna meminimalisir adanya kesenjangan antar desa, maupun pmeeratakan pembangunan, dan memangkas kemiskinan suatu daerah. Dalam artian warga masyarakat desa yang sebelumnya belum berkeinginan untuk membuka usaha dalam bentuk usaha menjual barang campuran dipinggir jalan, dengan kondisi akseibilitas infrastruktur jalan yang mulai ramai, maka warga ramai ramai membangun warung makan, warung kopi serta jual jualan kecil disepanjang jalan, depan rumahnya. tersebut.

Dukungan pembangunan infrastruktur desa berupa pembangunan jalan desa, baik dalam bentuk jalan yang sudah diaspal, ataupun jalan bentuk pengerasan memungkinkan warga untuk mempermudah arus barang dan jasa keluar masuk didesa tersebut. Contohnya masyarakat yang berdomisili diwilayah Kecamatan Bajo Barat, yang selama ini ingin menikmati ikan laut segar, warga tidak perlu lagi ke pasar Bajo, atau Pasar Belopa yang cukup jauh yang memakan waktu, biaya, dengan kondisi infrastruktur jalan yang terkoneksi antar desa, kecamatan membuat arus barang dan jasa yang dibutuhkan warga dapat diperoleh.dari penjual ikan menjajahkan ikannya maupun kebutuhan lainnya.

Pertama, Dalam kondisi yang demikian memudahkan arus inpormasi yang mulai terbuka tersebut memudahkan warga desa mengakses berbagai kebutuhan inpormasi baik bidang pengembangan usaha, dunia pendidikan, kesehatan maupun hiburan.

Kedua dengan terbuka jaringan infrastruktur jalan maka konektivitas antar desa dengan desa lainnya memberikan kemudahan akses untuk dikunjungi,dimana pedagang kakilima dengan mudah mengantarkan barang kepasar desa atau kepelosok desa yang tidak terjangkau selama ini.

Ketiga, dengan konektivitas jaringan infrastruktur yang memadai tersebut, maka perwujudan layanan public tentunya semakin cepat dan membaik, Misalnya bidang pendidikan, transportasi, inpormaasi dan kemudahan arus barang dan jasa.

Keempat, dengan konektivitas infrastruktur memberikan kesempatan masyarakat untuk membuka lapangan usaha dan lapangan kerja. Serta peluang untuk meningkatkan pendapatan, Dalam artian masyarakat yang selama ini ketegantungan menjual hasil produksi pertanian, perkebunan yang nilai jual rendah, namun dengan terbangunnya konektivitas jaringan infrastruktur tentunya masyarakat berkesempatan untuk melakukan jaul beli dipasar dan memperoleh nilai tambah atas produskinya yang selama ini dinikmati oleh pedagang, tengkulak.

### **Faktor faktor berpengaruh terhadap kelancaran pembangunan infrastruktur ditingkat pedesaan**

Masalah krusial yang sering mengemuka dan berpengaruh terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan, yang mengakibatkan keterlambatan operasional dilapangan untuk menjadi perhatian semua pihak yang berpentingan, antara lain :

- b. Kurangnya transparansi atas Pembebasan lahan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya ketidakpercayaan atau terjadinya mis- informasi dan komunikasi yang diterima warga, kurang valid sehingga muncul keragu-raguan dan saling mencurigai yang berakibat terjadinya demo, aksi warga. Hal ini kerap terjadi Tim /pihak yang tidak bertanggung jawab mengambil kesempatan.
- c. Kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah dan Tim terkait, hal ini menjadi salah satu masalah yang perlu diantisipasi karena seringkali terjadi perintang/ penolakan warga, melakukan demo, akibat kurangnya sosialisasi yang diterima oleh warga yang terkena pembangunan/ pembebasan lahan karena pihak pemerintah yang turun menemui melakukan musyawarah dilakukan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan, penentu kebijakan (alias bawahan yang tidak memiliki kompetensi).
- d. TIM yang dibentuk tidak solid, sering dilakukan penggantian pejabat, oleh pihak pemerintah (Instansi terkait) mengganti anggota Tim, sehingga terjadi kesalahpahaman, bias informasi awal yang diterima/ diketahui / disepakati warga mengalami perubahan..
- e. Rancangan /desain (DED) maupun RAB atas bangunan yang akan direncanakan pada suatu lokasi, sering mengalami perubahan desain, atau pemindahan lokasi maupun anggaran biaya yang memakan waktu yang lama untuk mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang.
- f. Proses administrasi mulai perencanaan, pelaksanaan sampai penyelesaian /perampungan kegiatan, maupun pengawasan kegiatan sering terkendala, terutama disusupi penyalagunaan dana maupun unsur unsur yang dapat merugikan keuangan negara/ daerah.
- g. Masukan, saran, informasi warga tidak diperhatikan / sering dikesampingkan bahkan oleh TIM /pemerintah setempat kurang mempertimbangkan pada hal informasi tersebut memiliki fakta, data yang akurat.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

**Pembangunan infrastruktur** pedesaan yang menghubungkan wilayah produksi dengan daerah distribusi, termasuk mempermudah akses menuju ke kawasan wisata, serta diharapkan membuka peluang lapangan kerja, dan mengakselerasi perekonomian rakyat. Konektivitas jejaring diwujudkan dalam ketersediaan infrastruktur yang memadai guna meminimalisir adanya kesenjangan antar desa, maupun dalam rangka mewujudkan pemerataan hasil hasil pembangunan terutama pada daerah tergolong 3 T (tertinggal, terdepan dan terluar.) **Dengan** demikian pembangunan infrastruktur pedesaan yang diprogramkan oleh pemerintah diharapkan dapat memudahkan arus informasi , barang dan jasa yang mulai terbuka tersebut, serta memudahkan warga desa mengakses berbagai kebutuhan informasi baik bidang pengembangan usaha, dunia pendidikan, kesehatan maupun hiburan. Pembangunan infrastruktur **pedesaan** yang menghubungkan wilayah produksi dengan daerah distribusi, termasuk mempermudah akses menuju ke kawasan wisata, serta diharapkan membuka peluang lapangan kerja. untuk

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena sosial maupun fenomena kemasyarakatan yang berhubungan dengan rencana kegiatan fisik Pembangunan infrastruktur pedesaan pada desa-desa atau wilayah pinggiran yang belum tersentuh hasil pembangunan. dalam bentuk, aktivitas, karakteristik, koordinasi Pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan apakah sudah seiring dengan kebutuhan masyarakat, dengan fungsi layanan yang transparan dan akuntabel yang diharapkan oleh stakeholders

### **Saran Saran**

Percepatan pembangunan infrastruktur, yang selama ini hanya dinikmati masyarakat yang berdomisili di daerah perkotaan, maka melalui konektivitas pembangunan yang diutamakan /dimuali dari pinggiran pedesaan diharapkan membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat. Sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan hasil hasil pembangunan, maka disarankan kepada pemerintah daerah/ desa yang mengelola dana desa, maka untuk :

1. Memprioritaskan sebagian dana desa untuk diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, (sesuai ketentuan dan peraturan) dalam rangka membuka jejaringan dan mempermudah akses arus barang dan jasa produksi untuk dilakukan distribusi barang dan jasa kewilayah lain yang membutuhkan.
2. Pembangunan infrastruktur, diutamakan bagi wilayah/desa yang tergolong 3 T (terdepan, terpencil dan Terluar) hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang berdomisili pada wilayah 3 T, dapat memperoleh kemudahan layanan publik maupun layanan dasar yang menjadi kebutuhan pokok.
3. SEyogianya masyarakat lokal diberdayakan dalam program pembangunan tersebut sehingga warga merasa ikut berpartisipasi dan memiliki bertanggung jawab atas pembangunan yang dialokasikan di daerahnya. terutama penciptaan lapangan kerja yang selama ini masih sangat terbatas dinikmati warga masyarakat

### **DAFTAR REFERENSI**

- Adi, Rukminto. 2007. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bintoro Tjokroaminoto,. 1984. *Perencanaan Pembangunan*. Gunung Agung Jakarta Indonesia
- Kartasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan.*, PT. Pustaka Cidesindo. Jakarta.
- Kartasmita Ginanjar. 1995. *Pemberdayaan Masyarakat Suatu Tinjauan Administrasi, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya ; Bandung*
- Moleong, Lexy. 2004. Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya; Bandung
- Nawawi, Hadari dan M. Martini. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT. Refika Aditama; Bandung.
- Sugiyono. 2012 *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B”*. alfabeta, Bandung.
- Siagian, Sondang P, 1994, *Administrasi Pembangunan*, Gedung Agung, Jakarta.
- Tarigan, Robinson. 2008. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Edisi Kedua. Bumi Aksara.
- Kodoatie, R.. J., dan Sugiyanto, 2002. *Banjir*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009, tentang Sistem  
Perencanaan Pembangunan Nasional  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa  
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka  
Menengah Nasional (RPJMN)  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan  
Pembangunan Desa  
Kabupaten Luwu Dalam Angka, BPS, 2020